RESUME MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA

NAMA : ST. AWALIYAH RAHMA

NIM : 10200120146

KELAS : HTN D

PEMBAHASAN :

Pengertian Hukum Tata negara
Sumber-sumber Hukum Tata Negara
Asas-asas Hukum Tata Negara
Sejarah Ketatanegaraan Indonesia
Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara
Organ Dan Fungsi Kekuasaan Negara

A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA.

Hukum tata negara yaitu, sebuah hukum yang mengatur organisasi Negara meliputi bentuk Negara, bentuk pemerintahan, bentuk lembaga-lembaga Negara dan kewarganegaraannya, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, hubungan antar lembaga Negara serta hak dan kewajiban warganegara. Jadi Hukum tata negara adalah peraturan hukum yang mengatur tentang organisasi kekuasaan pada suatu negara (organisasi Negara) dan segala aspek yang berhubungan dengan Negara.

Hukum tata negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Selain pengertian secara umum, ada pula pengertian menurut para ahli. Salah satu ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum tata negara adalah Van der Pot, dimana ia mengatakan bahwa hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

Adapun Pengertian dari Hukum Tata Negara Menurut para Ahli Yaitu :

1. Van der Pot

Hukum tata negara merupakan serangkaian peraturan yang digunakan untuk menentukan badan mana saja yang digunakan dan diperlukan, kewenangan masing-masing badan, hubungan antara badan satu dengan badan yang lain, serta hubungan dengan individu-individu didalam suatu negara.

2. Van Vollen Hoven

Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur individu-individu yang terikat dengan hukum, serta hukum yang menentukan sistematika penyusunan wewenang suatu badan-badan tersebut

3. Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi Negara.

4. Mac Iver

Negara merupakan Organisasi politik yang ada di dalam masyarakat, tetapi negara itu bukan bentuk dari masyarakat. Negara merupakan organisasi dalam masyarakat, yaitu organisasi-kapstok.

5. Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H.

Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa: "Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengatur tata negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatan (hierarchie), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan paerlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri.

6. Vollenhoven

Hukum tata negara membahas masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan serta hubungannya menurut hierarki serta hak dan kewajiban masing-masing, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya, semua itu menunjukkan negara dalam keadaan statis

B. SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Sumber hukum tata negara Indonesia mencakup sumber hukum dalam arti materiil dan sumber dalam arti formil. Hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Yurisprudensi ketatanegaraan (Putusan hakim TUN) Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan (Traktat).

Adapun Sumber-sumber hukum negara Indonesia terbagi atas 5 yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya
2. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Penetapan Presiden
5. Peraturan Daerah, yang dapat dibagi menjadi: Peraturan Daerah Provinsi (Tingkat I), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Tingkat II), Peraturan Daerah Desa.

Adapun 2 jenis sumber-sumber Hukum tata negara Yaitu :

1. Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang ditinjau dari segi bentuknya, sumber hukum ini sudah memiliki bentuk tertentu sehingga kita dapat menemukan dan mengenal suatu bentuk hukum dan menjadi faktor yang memberlakukan dan mempengaruhi kaidah atau aturan hukum.
2. Sumber hukum formal ini biasanya digunakan oleh para hakim, jaksa dan penasehat hukum sebagai dasar atau pertimbangan untuk membuat putusan, rumusan tuntutan dan atau sebagai nasehat hukum kepada kliennya. Sumber-sumber hukum formil dalam tata negara dikenal dengan istilah kenbron.

C. ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

Asas-asas yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Pernyataan ini juga disampaikan di Undang-undang Dasar 1945. Negara hukum bermakna bahwa suatu negara tersebut memihak akan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan atas dasar kekuasaan pemerintah semata. PENGERTIAN ASAS HTN Asas adalah pandangan untuk mengatur suatu rangkaian tertentu terhadap suatu hal (atau dapat juga disebut sebagai grean desaing terhadap suatu hal tertentu) Asas bukan merupakan norma yang harus ditaati tetapi dapat diikuti atau dipedomi.

Contoh-contoh asas negara hukum

1. Asas Hukum Tata Negara

Asas Pancasila

Seperti yang kita ketahui secara umum, salah satu makna Pancasila sebagai ideology negara ialah Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai dasar Pancasila harus menjiwai segala hukum yang ada di negara ini. Termasuk di antaranya ialah hukum tata negara di Indonesia. Maka dari itu, asas hukum tata negara di Indonesia yang pertama kita bahas ialah asas Pancasila.

Seluruh rakyat Indonesia telah menetapkan bahwa yang menjadi dasar negara ialah Pancasila. Artinya, setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah haruslah senantiasa berdasarkan ajaran Pancasila. Ketika kita berbicara dalam ruang lingkup hukum, maka Pancasila menjadi sumber hukum material dimana setiap materi yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang akan berlaku maupun telah berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terdapat di dalam Pancasila.

2. Asas Hukum Tata Negara

Asas Negara Hukum

UUD 1945 di dalam pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Atas ketentuan yang tegas ini, maka setiap kebijakan publik dan tindakan segenap rakyat Indonesia haruslah berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini dan juga di dunia internasional.

Adapun Ciri-ciri Asas negara ialah terdapatnya pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia, terdapatnya peradilan yang merdeka, terdapatnya legalitas atau keabsahan dalam perkara hukum, terdapat UUD yang memuat aturan mengenai hubungan di antara

pemerintah dan rakyat, terdapatnya pembagian kekuasaan di antara lembaga pemerintahan.

3. Asas Hukum Tata Negara

Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di dilaksanakan menurut UUD”.

4. Asas Hukum Tata Negara

Asas Negara Kesatuan

Adalah Negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah pemerintah pusat.

Pemerintah pusat meliputi : MPR,DPR,MA,Dsb

Pemerintah Daerah meliputi : DPD,BUPATI, Walikota,Dsb

5. Asas Hukum Tata Negara

Asas Pembagian Kekuasaan

“ Asas pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki prinsip membagi kekuasaan disetiap daerah.Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekuasaan semena-mena yang dilakukan oleh satu pemimpin atau kelompok.

Di Indonesia, tata hukum negara yang digunakan adalah UUD 45 yang telah di amandemen. Berikut adalah beberapa tata hukum yang pernah digunakan oleh Bangsa Indonesia, baik sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan.

Tata Hukum Sebelum Kemerdekaan

- Masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) (1602-1799)
- Masa Besluiten Regerings (1814-1855)
- Masa Regerings Reglement/RR (1855-1926)
- Masa Indische Straatsregeling (1926-1942)
- Masa Jepang (Osamu Seirei) (1942-1945)
- Tata Hukum Setelah kemerdekaan
- Masa UUD 1945 (17 Agustus 1945-26 Desember 1949)
- Masa Konstitusi RIS (27 Desember 1949-16 Agustus 1950)
- Masa UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950-4 Juli 1959)
- Masa Kembali Kepada UUD 1945 (5 Juli 1959-13 Oktober 1999)
- Masa Amandemen (21 Oktober 1999-Sekarang)

D. SEJARAH HUKUM TATA NEGARA

1) Sejarah Hukum Tata Negara Ngesti D. Prasetyo

2) Peraturan Perundang-undangan pada hindia Belanda

Peraturan ini di bentuk oleh badan pembentuk undang-undan di negeri Belanda.

Mahkota bersama parlemen Algemene Maatsregelen van Bestuur (AmvB). Peraturan yang di bentuk oleh Mahkota sendiri. Ordonantie. Peraturan di buat oleh Gubernur jendral bersama-sama dengan volksraad. Tahun 1918 Regeerings Verordeningen. (Rv). Peraturan ini di buat oleh gubernur jendral sendiri.

3) Perkembangan Ketatanegaraan

- Tahun 1602 : Kedatangan VOC sistem pemerintahan Konsentralisitas Berkembang asas dekonsentrasi yaitu menghendaki wilayah negara di bagi menjadi wilayah administrasi atau pamong praja.
- Tahun 1903 : Desentralisasi 1903

E. KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN TATA NEGARA

1. Pengertian

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (*fundamental*) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yaitu negara.

Bertolak dari konsepsi tersebut, maka secara umum istilah konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Pengertian konstitusi, dalam prakteknya dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar.

L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, kalau *gronwet* (Undang-undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan *constitution* (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Sementara Sri Soemantri M, dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-undang Dasar. Penyamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia termasuk di Indonesia.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3 yaitu :

- *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
- *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
- *Die geshereiben verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa jika Undang-Undang Dasar dihubungkan dengan konstitusi, maka Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yang tertulis saja. Disamping itu konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis semata, tetapi mengandung pengertian sosiologis dan politis

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian:

- Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
- Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-undang Dasar (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Misalnya UUD RI 1945, Konstitusi USA 1787.

2. Konstitusi Hukum Tata Negara

- Konstitusi sebagai kesatuan organisasi.
Dalam hal ini Kesatuan Organisasi ini menjangkau semua perangkat hukum yang ada kaitannya dengan kenegaraan serta semua organisasi yang ada dalam negara.
- Konstitusi sebagai pembentuk negara.
Bahwa dengan diberlakukannya konstitusi, dapat segera ditunjukkan kelengkapan bentuk dari negara tersebut, apakah bentuknya itu demokrasi ataukah monarki. Mengenai sendi demokrasi itu (secara langsung atau tidak langsung) telah mengemukakan suatu identitas bahwa dalam hal ini kepentingan konstitusi tertuju kepada rakyat, perjuangannya jalan mencapai tujuannya guna mencapai tujuan/cita-cita dengan penuh keberhasilan.
- Konstitusi sebagai faktor pengimbang pelancar (integrasi).
Demi kepentingan hubungan dalam percaturan hidup di dunia sangat diperlukan lambang dari ciri-ciri yang menunjukkan adanya negara yang teratur. Lambang dan ciri-ciri ini akan memperlancar, lebih memantapkan dan lebih menjamin keteraturannya itu, seperti: adanya lagu kebangsaan, bahasa nasional, bendera, dan lambang kenegaraan.
- Konstitusi sebagai norma-norma hukum tertinggi yang menjadi dasar dari segala-galanya, atau menjadi sumber bagi segala peraturan hidup yang diberlakukan dalam negara tersebut.
- Konstitusi Relatif
Dalam hal pengertian konstitusi yang relatif ini penjelasan yang dikemukakan adalah sekitar konstitusi dalam arti formal atau yang tertulis.
Konstitusi formal dapat diberlakukan untuk jangka waktu panjang, sampai puluhan atau ratusan tahun, tergantung dari arti materilnya atau isinya. Jadi kalau segi materilnya memang fleksibel, mantap bagi kehidupan dan perkembangan negara dan bangsa, tentulah konstitusi demikian akan dipertahankan.
- Konstitusi Positif
Konstitusi dalam arti positif mengandung pengertian sebagai keputusan politik tertinggi, yang menentukan nasib seluruh rakyat dimana konstitusi itu diberlakukan. Adapun keputusan politik tertinggi lazimnya menunjukkan perubahan-perubahan yang menuju perbaikan, atau perkembangan negara dan bangsa, misalnya memberikan garis-garis besar bagi pengaturan kehidupan bangsa dan negara setelah perolehan kemerdekaan, perebutan kemerdekaan, dan lain sebagainya.
- Konstitusi Ideal

Jika melihat dari segi demokrasi atau kepentingan rakyat, maka konstitusi yang ideal dengan sendirinya yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi, cita-cita yang timbul lainnya dengan melalui konstitusi agar pemerasan, perbuatan sewenang-wenang terhadap rakyat dapat dihilangkan, dan sebagai gantinya rakyat diberikan hak-hak kebebasan dan persamaan hak.

3. Nilai Konstitusi

Adapun tiga jenis penilaian konstitusi sebagai berikut.

1. Nilai Normatif

Nilai ini diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar secara murni dan konsekuen, konstitusi itu ditaati dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikitpun.

2. Nilai Nominal

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna. Sebab-sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.

3. Nilai Semantik

Suatu konstitusi bernilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum berlaku namun dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka, sedang dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

4. Sifat Konstitusi

- Bersifat Luwes/Fleksibel

Konstitusi yang bersifat luwes atau fleksibel adalah konstitusi yang baik, karenanya dapat dengan mudah menerima perubahan apabila diperlukan sekali, serta dengan mudah pula dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

- Tertulis dan Tidak Tertulis

Bersifat tidak tertulis:

Suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal,. Seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand.

- Bersifat tertulis:

Konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal.

5. Perubahan Konstitusi

Secara garis besar konstitusi dapat berubah atau diubah melalui dua jalan, yakni melalui cara berikut:

1. Jalan yuridis formal.

Jalan pertama, dilakukan sesuai dengan ketentuan formal mengenai perubahan konstitusi yang terdapat di dalam konstitusi itu sendiri dan mungkin diatur dalam peraturan perundangan lain.

2. Jalan non yuridis formal atau jalan politis.

Perubahan konstitusi tersebut biasanya terjadi Karena sebab tertentu atau keadaan khusus yang mendorong terjadinya perubahan konstitusi. Perubahan demikian dapat berupa perubahan total atau sebagian ketentuan saja sesuai kebutuhan. Perubahan konstitusi secara politis ini kalau berjalan dan dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat, maka perubahan demikian secara yuridis adalah sah.

Perubahan konstitusi di atas sesuai dengan George Jellinek, yang membedakan dua cara perubahan konstitusi, yaitu melalui cara berikut:

Yang disebut “verfassungs-anderug”, yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan konstitusi.

6. Objek Hukum Tata Negara :

- a. Organisasi negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
- b. Struktur, tugas dan wewenang dari alat perlengkapan negara.
- c. Hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara vertikal maupun horizontal.
- d. Wilayah negara, sistem pemerintahannya.
- e. Kedudukan serta hak-haknya.
- f. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya.

F. ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA

- Organ kekuasaan negara ada dua kategori :
organ utama (main state's organ) dan organ bantu (auxiliary state's organ). Main state's organ adalah pelaksana utama dari ketiga kekuasaan negara. Contoh : MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA serta MK.
- Menurut van Vollenhoven, fungsi kekuasaan dapat dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu:
 1. Regeling (pengaturan) legislative
 2. Bestuur (pemerintahan) eksekutif
 3. Rechtspraak (peradilan) yudisial
 4. Politie (keamanan) aparat keamanan